

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Pembangunan nasional dan perkembangan perekonomian yang sangat pesat merupakan proses perubahan yang memberikan kebutuhan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu pemerintah sangat mengandalkan penerimaan dari sektor perpajakan sebagai tulang punggung penerimaan negara. Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang tidak perlu dibayarkan kembali mempunyai prospek yang sangat mungkin untuk menjadi satu-satunya sumber utama penerimaan negara yang dapat diandalkan. Direktorat Jendral Pajak (DJP) berusaha meningkatkan penerimaan pajak diantaranya dengan cara meningkatkan jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar secara terus menerus dan dengan melakukan reformasi kebijakan perpajakan.

Pajak di gunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, oleh karena itu pemungut pajak harus adil diselesaikan dengan kemampuan masing-masing. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 A. Karena pajak merupakan iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan imbalan jasa

(kontaprestasi) secara langsung yang di tujukan untuk pemabayaran pengeluaran umum. (Suryarini dan Tarmidji, 2012)

Sebagai warga negara Indonesia dibutuhkan kesadaran yang besar untuk membayar pajak yang merupakan salah satu perwujudan pengabdian sebagai wajib pajak. Membayar pajak dilandasi kesadaran bahwa dengan fasilitas negara, masyarakat Indonesia dapat melakukan kegiatan kegiatan usaha. Sesuai dengan arti pajak itu sendiri yaitu iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung, ditujukan dan diinginkan untuk memelihara kesejahteraan umum. (Soemitro, 2001)

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut juga dibutuhkan dukungan masyarakat maupun DPR agar koordinasi dengan setiap instansi maupun instansi pemerintah dapat lebih kuat, serta disebarkannya program kampanye sadar dan peduli pajak yang berkesinambungan dan merata serta program pelayanan pengembangan pelayanan perpajakan. Karena kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaan program-program tersebut sehingga masih banyak wajib pajak yang belum tahu bagaimana melakukan perhitungan dan pelaporan pajak.

Sejak reformasi perpajakan pada tanggal 31 Desember 1983 yang di tetapkan dan menghasilkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan diperbarui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment* yaitu sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas

pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak, menjadi *self assessment* yaitu menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Upaya pemberdayaan masyarakat dari sistem melalui pelaksanaan sistem ini, perlu diikuti dengan tindakan pembinaan dan pengawasan oleh Direktorat Jendral Pajak serta diimbangi dengan kesadaran wajib pajak dalam rangka peningkatan penerimaan negara.

Pajak penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau di peroleh dalam tahun pajak. Pajak penghasilan terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, dan PPh pasal 26.

Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan dalam bagian tahun pajak. Ada beberapa jenis pajak penghasilan yang salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 23. Salah satunya juga mengatur tentang pajak yang dikenakan pada penghasilan yang berasal dari modal atau hadiah, dan penyerahan jasa. Pajak penghasilan 23 adalah pajak yang di potong atas penghasilan yang berasal dari modal atau hadiah dan penyerahan jasa selain yang telah di potong pajak penghasilan pasal 21.

Pelaksanaan pajak penghasilan pasal 23 juga diterapkan pada PT Hutan Alam, pelaksanaan PPh pasal 23 yang ada pada PT Hutan Alam adalah PPh pasal 23 Atas jasa.

pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebagai Wajib Pajak melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia, yaitu pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 3 menyebutkan bahwa setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu dengan nama dan dalam bentuk apapun selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pada prinsipnya pelaksanaan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi dalam arti bahwa pemotongan, penyetoran dan pelaporannya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Berdasarkan pengertian latar belakang diatas,

maka penulis tertarik mengambil judul tema penelitian. **“Mekanisme Perhitungan, Pelaporan, dan Perekaman PPH 23 di KPP Pratama Genteng Surabaya”**.

1.2 Tujuan Tugas Akhir

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian Mekanisme Perhitungan, Pelaporan, dan Perekaman PPH 23 di KPP Pratama Genteng Surabaya yang sesuai menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

1.3 Manfaat Studi Lapangan

Akan halnya manfaat dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk KPP Pratama Genteng Surabaya

Studi lapangan tersebut memberikan informasi bagaimana penerapan perpajakan di sekitar masyarakat supaya Direktorat Jenderal Pajak dapat melihat apakah peraturan perpajakan yang berlaku dapat mendorong pengusaha dalam melakukan kewajiban perpajakannya, apakah peraturan perpajakan yang berlaku mudah dilaksanakan atau malah sebaliknya peraturan tersebut sulit dilaksanakan sehingga Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan revisi atas peraturan tersebut. Disamping itu, informasi ini juga bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan

pengembangan potensi perpajakan dalam setiap penerapan perpajakan di lapangan.

- b. Bagi Penulis berharap dapat menambah wawasan pengetahuan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan melakukan praktek di perusahaan selama melakukan penelitian dan hasil studi lapang ini juga diharapkan bisa memberikan sumber referensi dan tambahan pengetahuan bagi semua pihak terkait, ataupun bagi peneliti lain yang akan melakukan studi lapang pada bidang kajian yang sejenis.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dibahas, maka ruang lingkup masalah yang akan dikaji adalah Mekanisme Perhitungan, Pelaporan, dan Perekaman PPH 23 di KPP Pratama Genteng Surabaya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Selama penelitian ini saya sendiri menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi:

- a. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui Tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber, ini dilakukan untuk memperoleh suatu informasi yang tepat dan jelas.
- b. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung kepada obyek yang diteliti ditempat penulis melakukan praktek kerja lapang.
- c. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengambil dokumen atau data-data ditempat praktik kerja lapang untuk dijadikan acuan mengerjakan Tugas Akhir.

Selain teknik pengumpulan data diatas penulis juga menggunakan jenis data Riset Kepustakaan (Library Research), Yaitu metode yang digunakan untuk mencari data yang bersifat sekunder, biasanya data yang berasal dari di KPP Pratama Genteng Surabaya. Data ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis sumber pustaka yang relevan berhubungan dengan masalah yang diteliti guna memperoleh tinjauan pustaka yang dapat dijadikan panduan dalam penulisan ini seperti penelitian terdahulu, Undang-Undang Perpajakan dan pendapat para ahli.